

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang sekarang ini, sektor bisnis di Indonesia mulai berkembang. Tentu saja kebanyakan dari mereka masih memfokuskan tujuan utamanya pada pencarian keuntungan semata. Perusahaan atau organisasi lainnya menganggap bahwa sumbangsih kepada masyarakat cukup diberikan melalui nilai dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dengan produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Ketiga hal tersebut tidaklah cukup apabila perusahaan ingin bertahan sampai lima tahun ke depan karena masyarakat tidak hanya menuntut perusahaan menyediakan barang dan jasa saja tetapi juga pertanggungjawaban secara sosial terhadap kehidupannya.

Hal inilah yang mendorong perubahan paradigma para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan dimana fokusnya tidak hanya pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu para pemimpin perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan dituangkan dalam bentuk suatu kepedulian sosial yang dapat kita namakan sebagai *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR). Dimana dalam praktiknya organisasi - organisasi bisnis melihatnya sebagai tekanan karena dalam mengimplementasikannya CSR masuk kedalam sebuah tantangan bisnis yang baru berkembang di tahun 2000-an.

Dalam praktiknya, seperti yang kita telah ketahui CSR belum mempunyai dasar pemikiran dan aturan yang cukup jelas dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari, pengimplementasian CSR itu sendiri masih bersifat sukarela (*voluntary*). Tim *International Organization for Standardization* (ISO) pada bulan September 2004 sebagai induk dari organisasi standar internasional mengundang berbagai pihak untuk melahirkan panduan (*guidelines*) dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama **ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility**. ISO 26000 ini sifatnya hanya panduan saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan (*requirements*) karena memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi (Yusuf Wibisono, 2007 : 38).

Hal ini memang harus dapat kita pahami, karena seperti yang telah kita ketahui CSR merupakan dampak dari perkembangan perubahan di dunia bisnis. Walaupun demikian inti dari konsep ini adalah keseimbangan antara penitikberatan perhatian terhadap aspek ekonomis dan aspek sosial serta lingkungan. Selain itu pelaporan non keuangan secara umum telah diakomodasi di Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK No. 1 menyatakan tentang penyajian laporan

keuangan dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri di mana lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itu sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat.

Dengan menganalisis perkembangan *Corporate Social Responsibility*, didapatkan bahwa terdapat keterbatasan alam dalam mendukung kehidupan manusia sehingga perlu adanya upaya untuk menyadarkan dan membuat manusia peduli tidak hanya terhadap lingkungan hidup tapi juga pada lingkungan sosialnya (*sustainability communication*). Para akuntan di Indonesia telah turut menyadari bahwa pentingnya penyusunan *sustainability report* (laporan keberlanjutan) karena di dalamnya terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan tentu saja berbeda dengan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya hal tersebut kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa khususnya pada investor dan kreditor (bank) karena investor maupun kreditor (bank) tidak mau menanggung kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Dalam proses pelaporannya *sustainability report*, banyak diatur dalam standar aturan-aturan internasional baku yang diadopsi oleh

Indonesia salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) yang di dalamnya mengatur prinsip dasar yang harus terdapat pada *sustainability report* yaitu: seimbang, dapat dibandingkan, teliti, tepat waktu, jelas dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik memilih judul "*Analisis pengungkapan Voluntary yang digunakan Perusahaan Jasa Telekomunikasi mengenai Triple P (Profit, People, Planet).*"

#### **B. Perumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas mengenai kendala dan penerapan dalam karya ilmiah ini adalah

1. Apakah penerapan Pengungkapan Voluntary (Sukarela) yang digunakan Perusahaan Jasa Telekomunikasi dalam membuat Sustainability Report sudah sesuai dengan Global Report Initiative (GRI)?

### **C. Tujuan Penelitian :**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Laporan Keberlanjutan yang digunakan Perusahaan Jasa dibidang Telekomunikasi dalam Laporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
2. Mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan sebelum membuat *Sustainability Report*.

### **D. Manfaat Penelitian:**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang *sistem pengungkapan voluntary pada laporan kegiatan sosial sebagai Laporan Keberlanjutan Perusahaan* ke dalam kondisi yang nyata;
2. Memberikan informasi mengenai pentingnya disusun Laporan Keberlanjutan Perusahaan dalam suatu organisasi atau perusahaan;
3. Memberikan gambaran pada Masyarakat bahwa perusahaan ikut memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar;
4. untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta;